

**BUPATI ENDE****PERATURAN BUPATI ENDE****NOMOR 1 TAHUN 2012****TENTANG**

**PENYEDIAAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB
UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**BUPATI ENDE,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan penyediaan dana belanja langsung maupun tidak langsung untuk operasional pelaksanaan kegiatan;
 - b. bahwa proses pembahasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012 sampai dengan batas waktu 31 Desember 2011 belum teralisasi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ende tentang Penyediaan Belanja Yang Bersifat Mengikat Dan Belanja Yang Bersifat Wajib Untuk Kepentingan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG PENYEDIAAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2012.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
6. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.
8. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

BAB II

BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB

Pasal 2

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung yang akan diperhitungkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012, yang meliputi:

1. belanja tidak langsung, digunakan untuk kepentingan belanja pegawai yang meliputi gaji dan belanja penerimaan lainnya pimpinan anggota DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah, belanja dana perimbangan kepada desa;
2. belanja langsung, digunakan untuk kepentingan belanja pegawai honor tenaga kontrak dan untuk kepentingan belanja barang dan jasa yang meliputi pembayaran jasa telepon, listrik, air, gas, bahan bakar minyak, makan minum pasien di rumah sakit, panti sosial, pengadaan obat-obatan, pakan ternak, biaya perjalanan dinas dan yang menyangkut dengan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Pasal 3

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, tidak melebihi kebutuhan belanja 1 (satu) bulan atau 1/12 (satu per dua belas) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya, dengan rincian besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk kepentingan 1 (satu) bulan yang akan diperhitungkan dengan uang persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) triwulan atau semester I Tahun Anggaran 2012.

Pasal 5

Apabila sampai dengan bulan berikutnya, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2012 belum ditetapkan, maka untuk kepentingan bulan berikutnya besaran anggaran mengacu pada bulan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 4 Januari 2012

BUPATI ENDE,



DON BOSCO M. WANGGE

Diundangkan di Ende

pada tanggal 4 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE



YOSEPH ANSAR RERA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2011 NOMOR /

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TANGGAL 14 JANUARI 2012

TENTANG : PENYEDIAAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB UNTUK
KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2012

| NO | UNIT / DINAS | GAJI | UP |
|-------------|---|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | DINAS | | |
| 1 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | Rp 11.426.036.524 | Rp 1.277.342.000 |
| 2 | Dinas Kesehatan | Rp 1.815.210.367 | Rp 356.933.000 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum | Rp 303.937.775 | Rp 18.393.000 |
| 4 | Dinas Perhubungan | Rp 172.516.068 | Rp 69.846.000 |
| 5 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Rp 97.199.240 | Rp 71.313.000 |
| 6 | Dinas Sosial | Rp 107.969.757 | Rp 54.578.000 |
| 7 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Rp 148.804.667 | Rp 52.479.000 |
| 8 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah | Rp 107.393.339 | Rp 40.267.000 |
| 9 | Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Rp 554.768.843 | Rp 397.000.000 |
| 10 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan | Rp 172.940.170 | Rp 104.083.000 |
| 11 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan | Rp 286.155.244 | Rp 66.572.000 |
| 12 | Dinas Pertambangan dan Energi | Rp 117.206.094 | Rp 37.593.000 |
| 13 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Rp 118.228.249 | Rp 46.293.000 |
| 14 | Dinas Kelautan dan Perikanan | Rp 121.258.547 | Rp 55.241.000 |
| 15 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Rp 118.953.988 | Rp 63.550.000 |
| II | BADAN | | |
| 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp 130.483.233 | Rp 172.636.000 |
| 2 | Badan Lingkungan Hidup Daerah | Rp 91.765.023 | Rp 69.494.000 |
| 3 | Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | Rp 236.889.003 | Rp 84.662.000 |
| 4 | Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah | Rp 79.132.112 | Rp 24.325.000 |
| 5 | Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat | Rp 127.129.563 | Rp 41.459.000 |
| 6 | Badan Kepegawaian Daerah | Rp 144.154.146 | Rp 345.646.000 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Rp 87.485.994 | Rp 25.450.000 |
| 8 | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian | Rp 442.265.217 | Rp 77.750.000 |
| 9 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | Rp 125.567.150 | Rp 226.019.000 |
| III | KANTOR | | |
| 1 | Kantor Pertamanan dan Kebersihan | Rp 51.560.488 | Rp 40.241.000 |
| 2 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | Rp 127.563.412 | Rp 39.580.000 |
| 3 | Kantor Pelayanan Perijinan Satu Pintu | Rp 38.129.939 | Rp 18.095.000 |
| 4 | Kantor Pengolah Data dan Telematika | Rp 39.139.673 | Rp 38.037.000 |
| 5 | Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah | Rp 48.914.729 | Rp 33.400.000 |
| IV | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | | |
| 1 | Rumah Sakit Umum Daerah | 774.130.334,00 | Rp 337.579.000 |
| V | INSPEKTORAT | | |
| 1 | Inspektorat | 110.170.999,00 | Rp 82.783.000 |
| VI | SEKRETARIAT DAERAH | | |
| 1 | Sekretariat Daerah | 71.016.246,00 | Rp 434.406.000 |
| 2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 97.499.564,00 | Rp 706.207.000 |
| VII | BUPATI DAN WAKIL BUPATI | | |
| 1 | Bupati | 7.027.362,00 | - |
| 2 | Wakil Bupati | 5.774.393,00 | - |
| VIII | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | | |
| 1 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 231.938.964,00 | - |
| IX | KECAMATAN | | |
| 1 | Kecamatan Ende Tengah | 164.763.252,00 | Rp 10.575.000 |
| 2 | Kecamatan Ende Utara | 176.692.606,00 | Rp 11.187.000 |
| 3 | Kecamatan Ende Timur | 140.368.558,00 | Rp 12.437.000 |
| 4 | Kecamatan Ende Selatan | 192.733.542,00 | Rp 11.039.000 |
| 5 | Kecamatan Ende | 127.009.284,00 | Rp 12.566.000 |
| 6 | Kecamatan Nangapanda | 134.028.638,00 | Rp 12.685.000 |
| 7 | Kecamatan Pulau Ende | 75.431.861,00 | Rp 11.488.000 |

| | 2 | 3 | 4 |
|----|------------------------------|----------------|---------------|
| 8 | Kecamatan Ndonga | 159.361.728,00 | Rp 13.750.000 |
| 9 | Kecamatan Detusoko | 154.086.759,00 | Rp 12.308.000 |
| 10 | Kecamatan Wewaria | 98.031.931,00 | Rp 12.585.000 |
| 11 | Kecamatan Maurole | 93.884.558,00 | Rp 12.617.000 |
| 12 | Kecamatan Lio Timur | 84.845.843,00 | Rp 13.169.000 |
| 13 | Kecamatan Kotabaru | 78.395.845,00 | Rp 17.166.000 |
| 14 | Kecamatan Wolowaru | 139.218.855,00 | Rp 13.254.000 |
| 15 | Kecamatan Wolojita | 91.987.622,00 | Rp 11.708.000 |
| 16 | Kecamatan Maukaro | 74.238.268,00 | Rp 14.620.000 |
| 17 | Kecamatan Ndonga Timur | 66.548.639,00 | Rp 12.152.000 |
| 18 | Kecamatan Detukeli | 78.628.900,00 | Rp 13.245.000 |
| 19 | Kecamatan Kelimutu | 63.258.120,00 | Rp 12.494.000 |
| 20 | Kecamatan Kelisoke Lepembusu | 76.517.461,00 | Rp 14.567.000 |
| 21 | Kecamatan Ndori | 61.784.517,00 | Rp 12.376.000 |
| X | KELURAHAN | | |
| 1 | Kelurahan Rewarangga | | Rp 5.416.000 |
| 2 | Kelurahan Paupire | | Rp 4.250.000 |
| 3 | Kelurahan Mautapaga | | Rp 5.251.000 |
| 4 | Kelurahan Onekore | | Rp 5.104.000 |
| 5 | Kelurahan Roworena | | Rp 4.646.000 |
| 6 | Kelurahan Kotaratu | | Rp 5.416.000 |
| 7 | Kelurahan Kotaraja | | Rp 4.715.000 |
| 8 | Kelurahan Tetandara | | Rp 4.900.000 |
| 9 | Kelurahan Kelimutu | | Rp 7.588.000 |
| 10 | Kelurahan Potulando | | Rp 5.357.000 |
| 11 | Kelurahan Mbongawani | | Rp 4.945.000 |
| 12 | Kelurahan Paupanda | | Rp 4.933.000 |
| 13 | Kelurahan Rukun Lima | | Rp 5.416.000 |
| 14 | Kelurahan Detusoko | | Rp 5.083.000 |
| 15 | Kelurahan Wolojita | | Rp 5.250.000 |
| 16 | Kelurahan Watuneso | | Rp 5.291.000 |
| 17 | Kelurahan Ndorurea | | Rp 5.060.000 |
| 18 | Kelurahan Bokasape | | Rp 5.221.000 |
| 19 | Kelurahan Tanjung | | Rp 3.930.000 |
| 20 | Kelurahan Rewarangga Selatan | | Rp 5.145.000 |
| 21 | Kelurahan Roworena Barat | | Rp 4.622.000 |
| 22 | Kelurahan Onelako | | Rp 5.116.000 |
| 23 | Kelurahan Lokoboko | | Rp 5.020.000 |



BUPATI ENDE

DON BOSCO M. WANGGE